



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHSANUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3. NHK : 439287

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	905.550.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/289 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI		Rp. 905.550.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	336.000.000
1. MOTOR, VESPA PX150 Tahun 1986, HASIL SENDIRI		Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO TECHNO Tahun 2012, HASIL SENDIRI		Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA CB150R Tahun 2015, HASIL SENDIRI		Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI		Rp. 16.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI		Rp. 15.000.000
6. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI		Rp. 280.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	269.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	194.075.286
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.705.125.286



III. HUTANG

Rp. 24.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.681.125.286

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.